

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Potensi perikanan laut Indonesia yang terdiri atas potensi perikanan pelagis dan perikanan demersal tersebar pada hampir semua bagian perairan laut Indonesia yang ada seperti pada perairan laut teritorial, perairan laut nusantara dan perairan laut Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Luas perairan laut Indonesia diperkirakan sebesar 5,8 juta km² dengan garis pantai terpanjang di dunia sebesar 81.000 km dan gugusan pulau-pulau sebanyak 17.508, memiliki potensi ikan yang diperkirakan terdapat sebanyak 6.26 juta ton pertahun yang dapat dikelola secara lestari dengan rincian sebanyak 4.4 juta ton dapat ditangkap di perairan Indonesia dan 1.86 juta ton dapat diperoleh dari perairan ZEEI. Pemanfaatan potensi perikanan laut Indonesia ini walaupun telah mengalami berbagai peningkatan pada beberapa aspek, namun secara signifikan belum dapat memberi kekuatan dan peran yang lebih kuat terhadap pertumbuhan perekonomian dan peningkatan pendapatan masyarakat nelayan Indonesia. Padahal bila di lihat peringkat produksi ikan laut di dunia pada tahun 2002 menurut FAO, negara Indonesia menempati urutan ke lima yakni mampu memproduksi ikan laut sebesar 5.419.540 ton setelah Amerika yakni sebanyak 5.434.651 ton dan peringkat dibawahnya adalah Jepang yaitu sebesar 5.271.433 ton. sedangkan diposisi pertama adalah negara Cina yang mampu memproduksi ikan laut sebesar 44.320.395 ton.

Tabel 1.1

Peringkat Produksi Ikan Laut di Kawasan Dunia dan ASEAN Tahun 2002

No	Dunia	Produksi Ikan Laut (ton)
1.	China	44.320.395
2.	Peru	8.775.431
3.	India	5.962.616
4.	USA	5.434.651
5.	Indonesia	5.419.540
6.	Japan	5.271.433
7.	Russian Fed	3.333.635
8.	Norway	3.297.117
ASEAN		
1.	Indonesia	5.419.540
2.	Thailand	3.566.106
3.	Philippines	2.473.861
4.	Viet Nam	2.026.500
5.	Malaysia	1.440.674
6.	Singapore	7.796
7.	Brunei Darusalam	2.215

Sumber : WWW.fao.stat.org

Untuk kawasan ASEAN Indonesia menempati urutan pertama, peringkat berikutnya adalah Thailand dan Philipina yang masing-masing mampu memproduksi ikan sebesar 3.566.106 ton dan 2.473.861 ton.

Terdapat berbagai kesenjangan yang masih mewarnai pembangunan perikanan di Indonesia baik secara nasional maupun secara lokal administratif pengelolaan. Berbagai prasarana yang dibangun oleh pemerintah, seperti pembangunan pelabuhan perikanan dan tempat-tempat pendaratan ikan yang tersebar di berbagai wilayah belum memberikan hasil yang memuaskan sesuai dengan yang diharapkan, berbagai model pengaturan dan kebijakan yang diambil belum dapat menyentuh secara baik terhadap permasalahan mendasar yang ada.

Sejak dibentuknya sektor perikanan sebagai salah satu departemen yang sebelumnya hanya merupakan salah satu sub-sektor pertanian upaya memanfaatkan sumberdaya perikanan laut secara optimal dan lestari terus ditingkatkan dari satu periode ke periode lainnya sesuai dengan kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa yang selalu meningkat. Kemampuan yang meningkat ini juga tidak lepas dari beberapa faktor-faktor produksi yang selalu mengalami pertambahan dalam jumlah dan kualitasnya.¹ Karena merupakan tuntutan yang sangat mendesak bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat, terutama untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan, pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha, serta peningkatan ekspor untuk menghasilkan devisa negara.

Sumberdaya ikan merupakan milik bersama (*common resources*), sehingga dalam pengelolaannya tidak dapat dimiliki secara perorangan, menyebabkan semua lapisan masyarakat berhak untuk memanfaatkan, dan karenanya dapat menimbulkan berbagai macam persaingan antar pelaku, baik antar nelayan dengan nelayan, antar nelayan dan pengusaha, antar pengusaha dengan nelayan, dan antar pengusaha dengan pengusaha yang begitu ketat dan sulit dikendalikan.

Untuk menghindari itu semua maka akan diselaraskan dengan pembangunan beberapa dimensi utama, yaitu: pembangunan dan penyediaan sarana-prasarana yang memadai, perbaikan teknologi produksi, manajemen

¹ Sukirno, Sadono, *Pengantar Teori Makro Ekonomi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994, hal. 10

penyuluhan balai benih, penyediaan sumber dan jaringan informasi yang baik serta pembangunan sumberdaya manusia yang handal sebagai pelaku.²

Pada dasarnya kebijaksanaan pembangunan nantinya diarahkan untuk meningkatkan pendapatan dan taraf hidup dengan cara meningkatkan produksi, meningkatkan produktivitas tenaga kerja, kualitas dan kesempatan kerja di pedesaan serta mengentaskan penduduk dari kemiskinan.

Pengertian produksi sekarang ini diartikan sangat luas, yaitu mencakup setiap pekerjaan yang menciptakan atau menambah nilai atau guna suatu barang atau jasa. Ada tiga macam pengertian guna, yakni guna tempat, guna waktu, dan guna bentuk. Kekayaan alam yang sangat melimpah yang telah tersedia merupakan sifat guna yang paling elementer. Para nelayan yang bersusah payah mencari ikan dengan kapalnya disebut menciptakan kegunaan karena tempat. Jumlah rumah tangga perikanan yang menyimpan hasil tangkapan ikan tersebut sampai siap untuk dikemas, menciptakan kegunaan karena waktu. Akhirnya diolah dan dikemas oleh para produsen sampai siap untuk dijual, disebut menciptakan kegunaan karena bentuk.

Agar produksi dapat dijalankan untuk menciptakan hasil (produk atau output), maka diperlukan beberapa masukan atau faktor produksi (input). Hubungan teknis antara masukan (input) dan keluaran (output) itu biasanya digambarkan oleh fungsi dan produksi. Fungsi produksi tersebut menggambarkan suatu hukum proporsi, yaitu transformasi dari faktor produksi sehingga menghasilkan output dalam setiap periode waktu tertentu. Dengan kata lain, fungsi produksi mencerminkan teknologi yang dipakai oleh suatu perusahaan.

² Kertonegoro. *Semanae. Ekonomi Indonesia*, Yayasan Tenaga Kerja Indonesia, Jakarta, 1996, hal 43

atau suatu industri, atau suatu perekonomian, dalam kurun waktu tertentu. Dalam kurun waktu tertentu, fungsi produksi tersebut mencerminkan penggunaan teknologi tertentu. Apabila teknologi berubah, maka fungsi produksi juga berubah.

Untuk menghasilkan output maka faktor-faktor input perlu diproses bersama-sama dalam suatu proses produksi. Proses atau aktivitas produksi itu juga sering disebut metode produksi. Jadi metode produksi adalah suatu kombinasi dari faktor-faktor produksi yang dibutuhkan untuk memproduksi satu satuan produk. Biasanya untuk menghasilkan satu satuan produk, dapat digunakan lebih dari satu metode atau proses produksi yang berkesinambungan.³

Metode produksi yang efisien secara teknis berarti menghasilkan output tertentu dengan menggunakan kombinasi kuantitas faktor-faktor input yang sekecil-kecilnya (minimal). Misalnya untuk menghasilkan output tertentu, metode produksi A dikatakan relatif lebih efisien secara teknis daripada metode produksi B, karena metode A menggunakan faktor input yang lebih sedikit.

Dalam metode produksi, hanya metode yang efisien yang diperhitungkan. Dan hal itu tercermin dalam fungsi produksi yang hanya menggambarkan semua kemungkinan metode produksi yang efisien secara teknis. Dalam pengertian ekonomi yang luas ini produksi meliputi:⁴

1. Produksi ekstraktif, yaitu mendapatkan barang yang disediakan oleh alam seperti pertambangan, perikanan, dan perburuan.
2. Produksi agaris, yaitu mengerjakan tanah seperti dalam pertanian, perkebunan, dan kehutanan.

³ Sumodigrat, Gunawan: Agung, Lanang. Gist 1. *Ekonomi Produksi*, Karunika Universitas Terbuka, Jakarta, 1987, hal 14

3. Produksi industri yang meliputi pengerjaan bahan-bahan baku, barang antara dan barang selesai.
4. Produksi di bidang pengangkutan yang menghasilkan jasa memindahkan barang.
5. Produksi perdagangan, yaitu jasa memperdagangkan barang.
6. Produksi jasa-jasa lain, seperti memberi kredit (pinjaman), penyimpanan barang dalam gudang, jasa pertanggungan (asuransi) barang dan jiwa, dan sebagainya.

Tentu saja usaha ini tidak lepas dari peran pemerintah. Selain uang, pengeluaran pemerintah juga mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam suatu perekonomian. Maka dari itu sebagian pengeluaran dari pemerintah adalah untuk membiayai administrasi pemerintah dan sebagian lainnya adalah untuk membiayai kegiatan-kegiatan dalam pembangunan, termasuk diantaranya membayar gaji pegawai serta membayar jenis infrastruktur lainnya yang berperan penting dalam perekonomian. Pembelanjaan-pembelanjaan tersebut akan meningkatkan pengeluaran agregat dan mempertinggi tingkat kegiatan ekonomi negara.⁵

Kenyataan ini bisa dilihat pada produksi perikanan selama 1987-1992 terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Produksi perikanan pada tahun 1987 sekitar 2,7 juta ton kemudian meningkat menjadi 3,5 juta ton pada tahun 1992 atau meningkat rata-rata 5,83 persen tiap tahun. Pada tahun 1993 dan 1994 produksi perikanan telah mencapai 3,6 juta ton dan 4 juta ton. Dan pada tahun

⁵ Ibid. hal. 13

2000, 2001 telah mengalami kemajuan yaitu berkisar antara 5-5,5 juta ton. Hal ini telah menunjukkan bahwa usaha pemerintah hubungannya dengan pemanfaatan kekayaan hasil laut cukup berhasil, walaupun masih belum maksimal. Peningkatan produksi tersebut terutama berasal dari perikanan laut yang mencapai lebih dari 75 persen dari seluruh produksi perikanan. Rata-rata peningkatan produksi perikanan laut per tahun selama periode sebesar 5,79 persen dan perikanan darat 5,47 persen.

Jumlah rumah tangga perikanan pada tahun 1992 telah mencapai 1,7 juta, ini berarti selama periode 1987-1992 rumah tangga perikanan mengalami peningkatan rata-rata sebesar 2,61 persen tiap tahun. Sebagian besar rumah tangga perikanan merupakan rumah tangga perikanan darat yaitu mencapai 1,3 juta rumah tangga. Dari jumlah tersebut sebesar 1,02 juta adalah rumah tangga budidaya perikanan darat serta sisanya merupakan rumah tangga perairan umum. Perkembangan rumah tangga perikanan ini dari tahun ke tahun selama periode 1987-1992 cukup berfluktuasi. Pada tahun 1988, dan 1991 jumlah rumah tangga perikanan mengalami kenaikan sementara pada tahun 1989, 1990 dan tahun 1992 menurun. Hal ini lebih disebabkan karena pada tahun-tahun tersebut merupakan masa peralihan dari sektor pertanian ke sektor industri. Sedangkan pada tahun 1992-2000 pertumbuhannya cukup stabil, dari tahun 1993 antara 1,8 juta, sampai dengan tahun 2000 telah mencapai 2,1 juta. Namun pada tahun 1998 telah mengalami penurunan. Hal ini disebabkan karena pada tahun tersebut telah terjadi krisis ekonomi yang sempat membuat bingung bangsa kita. Akan tetapi hal tersebut dapat dijadikan acuan bagi bangsa kita. Dan itu terbukti, dengan selang

⁵ Sukirno, Sadono. *Op. Cit.*, hal. 151

waktu yang tidak terlalu lama sampai dengan tahun 2000 pertumbuhannya telah mencapai 2,1 juta rumah tangga perikanan.

Secara umum rata-rata produksi per rumah tangga perikanan telah menunjukkan peningkatan yang cukup berarti. Rata-rata produksi per rumah tangga dari 17,3 kuintal per rumah tangga meningkat menjadi 20,32 kuintal per rumah tangga. Peningkatan tersebut menjadi baik untuk perikanan darat maupun perikanan laut dimana perikanan laut mencapai 66,4 kuintal per rumah tangga sementara perikanan darat 6,4 kuintal per rumah tangga.

Walaupun dalam produksinya tergolong tinggi akan tetapi dalam proses penjualannya belum tentu mendapatkan harga sesuai dengan yang diinginkan. Hal ini lebih disebabkan karena persaingan harga antara ikan laut segar, hasil laut lainnya, ikan olahan dan ikan tawar segar. Perikanan darat dan budidaya ikan misalnya, berusaha untuk memaksimalkan hasil panen dari lingkungan perairan. Stok biomas dipengaruhi oleh empat faktor yaitu laju recruitment, laju pertumbuhan, laju kematian alami dan laju kematian akibat penangkapan. Perikanan tangkap berusaha untuk memaksimalkan hasil melalui kenaikan laju kematian, jika terlalu banyak ikan yang tertangkap maka recruitment dan pertumbuhan tidak mampu menggantikan stok yang rusak. Berbeda dengan budidaya, meningkatnya hasil melalui manipulasi seluruh faktor populasi yaitu pertumbuhan, reproduksi dan recruitment serta mortalitas alami. Dengan demikian dapat dilihat bahwa meningkatnya pendapatan perikanan laut di Indonesia seiring dengan meningkatnya harga ekspor ikan laut, jumlah rumah tangga perikanan laut dan jumlah perahu/kapal.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas dan teori dari beberapa ahli, ingin di teliti suatu peranan Harga ekspor ikan laut,

Jumlah rumah tangga perikanan laut, Jumlah perahu/kapal terhadap Pendapatan perikanan laut, maka akan diambil judul penelitian "**Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Perikanan Laut di Indonesia Kurun Waktu (1983-2002)**".

1.2. Perumusan Masalah

Dalam rumusan masalah ini dinyatakan bagaimana peranan variabel independen terhadap variabel dependennya.

1. Bagaimana pengaruh variabel harga ekspor ikan laut terhadap pendapatan perikanan laut di Indonesia dari tahun (1983-2002).
2. Bagaimana pengaruh variabel jumlah rumah tangga perikanan laut terhadap pendapatan perikanan laut di Indonesia dari tahun (1983-2002).
3. Bagaimana pengaruh variabel jumlah perahu/kapal terhadap pendapatan perikanan laut di Indonesia dari tahun (1983-2002).

1.3. Tujuan Penelitian

Dalam menyusun penelitian ini, tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis sampai sejauh mana bangsa kita dalam mengolah dan memanfaatkan kekayaan alam termasuk didalamnya sub sektor perikanan laut yang secara fetaknya (astronomis dan geografis) sudah diuntungkan.

2. Untuk menganalisis permasalahan yang biasa dihadapi oleh para produsen guna meningkatkan pendapatan perikanan laut di Indonesia.
3. Untuk menganalisis pengaruh harga ekspor ikan laut, jumlah rumah tangga perikanan laut dan jumlah perahu/kapal terhadap pendapatan sub sektor perikanan laut di Indonesia.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Dapat memberikan masukan-masukan kepada instansi yang terkait.
2. Sebagai bahan informasi bagi peneliti lain yang berminat pada masalah yang sama.
3. Sebagai salah satu syarat untuk mendapat gelar sarjana pada Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

1.5. Sistematika Penulisan

Penyusunan karya tulis ini akan di bagi dalam enam bab dan masing-masing bab terbagi dalam beberapa sub bab. Adapun pembagian bab tersebut adalah:

BAB I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Gambaran Umum Kelautan Indonesia

Bab ini berisi tentang tinjauan mengenai perkembangan kelautan Indonesia khususnya tentang Pendapatan, Harga

ikan, Jumlah rumah tangga perikanan laut dan Jumlah Perahu/Kapal.

BAB III Kajian Pustaka

Bab ini memuat tentang hasil-hasil penelitian terdahulu yang sejenis.

BAB IV Landasan Teori dan Hipotesis

Bab ini berisi teori-teori yang mendukung penelitian dan untuk memperkuat hipotesis yang dibuat dalam penelitian.

BAB V Metode Penelitian

Bab ini berisi tentang, data dan metode pengumpulan data, Definisi, operasional variabel, dan metode analisis data.

BAB VI Analisis Data

Bab ini berisi tentang hasil-hasil perhitungan (pengolahan data) dan interpretasi hasil analisis data.

BAB VII Kesimpulan

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran yang didasarkan dari hasil analisa data pada bab sebelumnya.

BAB II

GAMBARAN UMUM KELAUTAN INDONESIA

2.1. Diskripsi Wilayah Indonesia

Diketahui bahwa Indonesia merupakan negara yang terdiri dari gabungan beribu-ribu pulau, atau dapat pula disebut negara kepulauan. Menurut catatan Dinas Hidro-Oceanografi Angkatan Laut Republik Indonesia, jumlah pulau tersebut sekitar 17 508 buah pulau. Di antaranya 931 buah pulau telah dihuni penduduk, sedangkan sisanya belum berpenghuni. Namun, 11 464 buah pulau sudah diberi nama.

Sebagai negara kepulauan, wilayah Indonesia dikelompokkan menjadi empat gugusan pulau, yaitu sebagai berikut:

- a) *Gugusan Kepulauan Sunda Besar*, terdiri atas Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan pulau-pulau kecil disekitarnya.
- b) *Gugusan Kepulauan Nusa Tenggara*, terdiri atas Pulau Bali, Lombok, Sumba, Sumbawa, Flores, Timor, Sabu, Roti, Solor, Alor, dan pulau-pulau disekitarnya.
- c) *Gugusan Kepulauan Maluku*, terdiri atas Pulau Halmahera, Ternate, Tidore, Seram, Buru, Kepulauan Sula, Obi, Ambon, Kepulauan Kai, Kepulauan Aru, dan pulau-pulau kecil disekitarnya,
- d) *Irian Jaya dan Pulau-Pulau Kecil di Sekitarnya*, antara lain Pulau Biak, Waigeo, Salawati, Misool, Yos Sudarso (Pulau Kolepom), dan pulau-pulau kecil lainnya.

Dan apabila luas wilayah daratan sekitar 1,9 juta km² dibagi lagi menjadi luas masing-masing pulau dan kepulauan, yaitu pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Irian Jaya, Nusa Tenggara, dan Maluku.

Maka dengan adanya gugusan pulau-pulau tersebut menunjukkan sangat panjangnya garis pantai yang kita miliki, yaitu lebih dari 2 kali keliling bumi, dan 16 kali jarak dari ujung barat sampai ujung timur kepulauan Indonesia. Hal itu menunjukkan bahwa Indonesia memiliki perairan yang sangat luas. Perairan yang sangat luas merupakan kelebihan dan anugerah bagi bangsa kita. Kelebihan tersebut bukan hanya karena luasnya, melainkan juga sumber daya atau kekayaan yang ada didalamnya.

Selain itu, perairan seperti Selat Lombok, Selat Makassar, dan terus ke Laut Sulu merupakan perairan yang ramai dilayari kapal niaga asing seperti dari negara Asia, Eropa, dan Australia. Laut Maluku di Dangkalan Sahul merupakan urat nadi perdagangan antara Australia dan Asia serta antara negara-negara Asia Timur dengan negara-negara Asia Selatan, Timur Tengah, bahkan negara-negara Eropa. Indonesia juga diapit oleh pelabuhan pusat perdagangan dunia seperti: Singapura, Jepang, dan Hongkong.

2.1.1. Letak Astronomis Indonesia

Letak Astronomis adalah letak suatu tempat atau wilayah berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Dengan memperhatikan garis lintang dan garis bujur, tanah air kita terbentang di daerah sekitar khatulistiwa yaitu terletak antara 6^o LU-11^o LS dan antara 95^o BT-141^o BT. Oleh karena letak wilayah Indonesia berada di

daerah khatulistiwa, maka Indonesia memiliki iklim tropis, dan dengan memanjangnya wilayah Indonesia dari 95° BT sampai 141° BT, maka terjadi perbedaan daerah waktu.

2.1.2. Letak Geografis Indonesia

Letak Geografis adalah letak suatu tempat atau wilayah berdasarkan keadaan alam dan wilayah lain yang membatasinya. Indonesia berada diantara dua benua, yaitu Benua Asia dan Benua Australia. Maka dari itu, Indonesia disebut Nusantara. Nusa yang berarti pulau, antara yang berarti diapit. Karena Indonesia terletak diantara dua benua maka Indonesia memiliki dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Indonesia juga diapit oleh dua samudera, yaitu Samudera Indonesia dan Samudera Pasifik. Karena keuntungan letak tersebut, Indonesia dapat dikatakan sebagai jembatan yang menghubungkan Benua Asia dan Benua Australia.

2.1.3. Aspek Mata Pencaharian

Sumber daya alam besar sekali pengaruhnya terhadap mata pencaharian penduduk. Suatu mata pencaharian tidak dapat dipisahkan dari berbagai macam pengelolaan sumber daya alam, yaitu sumber daya bumi, air, udara, dan matahari.

Dengan letaknya yang sangat menguntungkan, yaitu dengan adanya dua musim dan iklim yang terjadi di Indonesia maka masyarakatnya lebih cenderung memanfaatkan kekayaan alam tersebut. Diantaranya upaya dalam memanfaatkan sumber daya bumi di sektor pertanian. Sektor ini mengelola tanaman pangan,

tanaman perkebunan, tanaman hutan, peternakan, atau perikanan yang akan menghasilkan bahan makanan maupun bahan baku untuk menunjang industri.

Dengan bermacam-macam hasil pertanian dari sumber daya alam yang dikelola oleh industri, kesempatan kerja terbuka semakin luas. Berarti, terbuka pemerataan kesempatan berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Potensi sumber daya bumi masih terbuka untuk memasuki berbagai bidang di luar industri dan pertanian. Dengan kemajuan iptek, timbulah berbagai penemuan baru. Maka akan timbul upaya memanfaatkan iptek untuk mengolah hasil sumber daya alam yang ada. Kemudian berdirilah berbagai jenis perusahaan, pabrik, dan industri yang mengelola berbagai sumber daya alam. Dengan demikian, terbukalah lapangan kerja baru yang merupakan mata pencaharian bagi penduduk sekitarnya.

2.2. Kondisi Kelautan Indonesia

Perikanan merupakan sektor yang penting, yaitu sebagai sumber pendapatan dan kesempatan kerja serta menarik perhatian dalam hal efisiensi dan distribusi. Masalah efisiensi dikaitkan dengan jumlah persediaan ikan yang terus terancam punah, dan masalah distribusi berkaitan dengan siapa yang akan memperoleh manfaat. Namun demikian sektor ini di negara-negara berkembang belum mengalami perkembangan sebagaimana mestinya, sehingga campur tangan pemerintah diperlukan dalam rangka meningkatkan pendapatan nelayan atau petani ikan, perbaikan gizi rakyat dan peningkatan ekspor serta memanfaatkan 200 mil Zona Ekonomi Eksklusif.

Dengan dicetuskannya wilayah perikanan dalam Zona Ekonomi Eksklusif sejauh 200 mil laut, maka hal ini mendorong negara-negara yang bersangkutan menyatakan batas-batas lepas pantai penangkapan yang diperluas untuk pengawasan eksklusif terhadap aktivitas-aktivitas ekonomi negara yang bersangkutan. Keberhasilan pembangunan perikanan tidak lepas dari perencanaan yang mantap berdasarkan informasi tentang semua aspek yang mempengaruhi sumber daya alam tersebut, terutama aspek sumber kehidupan dan penggunaannya. Untuk mencapai tingkat keberhasilan tersebut faktor utama yang menentukan adalah "pengelolaan secara tanggung jawab", artinya pengelolaan harus dilakukan secara bijaksana dalam melestarikan persediaan sumberdaya ikan tersebut yang sekaligus tidak saja dapat dinikmati secara optimal oleh generasi sekarang tetapi juga oleh generasi yang akan datang. Kegiatan pokok dari usaha perikanan berawal dari usaha penggalian sumber hayati perikanan, yang selanjutnya menimbulkan berbagai usaha yang menunjang usaha-usaha lanjutan. Adapun akibat yang timbul tidak saja hanya menyangkut aspek teknis biologis, tetapi juga aspek sosial, ekonomi, hukum, keamanan dan ketertiban masyarakat yang semuanya memerlukan pengendalian agar tercapai suatu keseimbangan dalam rangka mencapai tujuan pokok dari pembangunan perikanan tersebut. Sektor perikanan memberikan harapan untuk menjamin kelangsungan hidup manusia masa kini dan masa yang akan datang. Perikanan merupakan satu bagian dari kegiatan ekonomi yang memberikan harapan untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup manusia melalui berbagai usaha yang akhirnya bertujuan untuk meningkatkan pendapatan nelayan dalam rangka mencapai tingkat kesejahteraan hidup yang lebih baik.

Dari keadaan tersebut diatas salah satu usaha pokok dalam mempertahankan dan mengembangkan populasi ikan adalah dengan usaha pengelolaan yang efisien yang didasari oleh sistem manajemen yang mantap. Dalam pengelolaan tersebut haruslah diusahakan sedemikian rupa sehingga sumberdaya ikan tersebut tidak habis dan bahkan dapat ditingkatkan populasinya. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan sumberdaya ikan yang semakin meningkat sejalan dengan meningkatnya jumlah penduduk dan semakin tingginya pendapatan. Dalam memenuhi tingkat kebutuhan yang semakin tinggi, tidak dapat dihindari akan adanya proses pengambilan yang berlebihan dan tidak bertanggung jawab terhadap persediaan ikan yang ada. Hal ini mengandung resiko yang secara tidak langsung memberi beban sosial, yang dapat mempengaruhi proses kehidupan manusia khususnya dan masyarakat umumnya. Untuk itu dalam mengatasi permasalahan ini berbagai pihak termasuk pemerintah melibatkan diri dalam penanggulangan pemulihan sumberdaya ikan tersebut. Oleh karena itu pelaksanaan pembangunan perikanan khususnya dan pembangunan yang bijaksana pada umumnya harus berwawasan lingkungan sebagai sarana untuk mencapai keseimbangan pemenuhan kebutuhan bagi generasi sekarang maupun generasi yang akan datang.

2.2.1. Pertumbuhan Pendapatan Perikanan

Bagaimanapun juga nelayan Indonesia harus mampu menjadi tuan rumah di lautnya sendiri. Untuk mencapai hal tersebut, maka harus diupayakan mentransformasi para nelayan tradisional kita menjadi nelayan modern yang

tangguh untuk memanfaatkan semua potensi sumberdaya ikan yang ada, yang sekaligus dapat memainkan peran ganda dalam membantu menjalankan fungsi pengawasan terhadap berbagai praktek ilegal yang dilakukan di laut, terutama oleh nelayan-nelayan kapal asing yang masih berseliwuran menangkap ikan di perairan Indonesia tanpa dapat dihentikan. Dalam rangka memacu peran sektor perikanan di masa yang akan datang, maka pemerintah melalui Departemen Kelautan telah menetapkan empat misi, yakni:

- a. Peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir, perikanan dan kelautan khususnya nelayan dan petani ikan kecil,
- b. Peningkatan peran sektor perikanan dan kelautan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi.
- c. Pemeliharaan dan peningkatan daya dukung serta kualitas lingkungan perairan, dan
- d. Terciptanya stabilitas persatuan dan kesatuan bangsa.

Untuk hal itu, secara terpadu pembangunan perikanan dan kelautan selanjutnya menetapkan beberapa target riil yang akan diupayakan pencapaiannya, yaitu: penerimaan devisa kelautan dan perikanan diharapkan dapat mencapai US\$ 5 milyar pada tahun 2004, sumbangan terhadap PDB diharapkan mencapai 5 %, penerimaan negara dari bukan pajak (PNBP) penangkapan ikan akan mencapai Rp. 295 miliar serta PNBP penangkapan ikan di perairan ZEEI sebesar US\$ 65 juta, sumbangan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) sebesar US\$ 120 juta dari kegiatan penangkapan ikan.

Selain itu, ditargetkan peningkatan pemenuhan konsumsi ikan sebesar 21,93 kg/kapita/tahun serta penyerapan tenaga kerja sebesar 6,54 juta orang.⁷ Harapan-harapan tersebut memang tidaklah mudah dicapainya dengan berbagai macam permasalahan mendasar yang masih tersimpan, namun dengan keyakinan dan kekuatan yang digalang dari semua pihak, maka sumberdaya perikanan laut Indonesia dengan keanekaragaman (diversity) yang melimpah dengan jumlah stok yang sangat besar akan tetap memberi harapan dan peluang yang sangat terbuka lebar untuk mewujudkan obsesi kita.

2.2.2. Perkembangan Harga Ikan

Jenis jenis ikan laut yang diolah dan diekspor oleh para usaha besar yang bermitra dengan nelayan terdiri dari ikan tuna dan ikan cakalang dan beberapa jenis ikan yang disebut ikan dasar. Jenis ikan tersebut adalah ikan besar yang diekspor segar atau secara beku ke luar negeri.

Dengan menciptakan dan mengembangkan proyek kemitraan dengan para nelayan, perusahaan pengolahan mampu memproduksi macam-macam produk ikan olahan dengan mendapatkan nilai tambah yang tinggi. Hal ini karena produk-produk ikan olahan dijual dengan harga valas yang tinggi dengan jumlah yang cukup besar. Perusahaan besar tersebut membeli ikan dari kelompok nelayan tradisional yang menangkap ikan dengan perahu, disamping hasil penangkapan ikan dari nelayan yang bermitra dengan usaha besar tersebut. Harga ikan laut

⁷ Dahuri, R. *Kebijakan Penerbitan Izin Kapal Asing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia* Himasepa IPB, Jakarta, 2001, hal. 9.

segar di tingkat konsumen berkisar antara Rp 1500 - Rp 7000 per kg. Adanya perbedaan ini terjadi karena tempat pembelian yang berbeda. Tempat pembelian meliputi pedagang keliling, pasar umum dan supermarket. Perbedaan kualitas ikan juga kemungkinan ada pengaruh yang membedakan harga tersebut. Harga ikan tawar segar dan ikan olahan diduga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi besarnya kuantitas permintaan ikan laut segar. Harga ikan tawar segar berkisar Rp 1250 - Rp 6000 per kg, dan ikan olahan berkisar Rp 2025 - Rp 6500 per kg. Hal tersebut juga terjadi pada persaingan harga ekspor ikan. Perusahaan besar tersebut setiap tahun memiliki kelompok nelayan baru, yaitu para nelayan yang telah berhasil dan mampu memenuhi sasaran penangkapan ikan yang ditentukan oleh usaha besar. Dengan potensi untuk meningkatkan nilai maupun kuantitas ikan tersebut ke pasar-pasar luar negeri masih cukup tinggi. Maka dari itu sektor penangkapan maupun pengelolaan ikan melalui pola kemitraan sangat potensial untuk dikembangkan. Penerimaan untuk semua pihak yang bermitra dalam proyek kemitraan tersebut dapat memperkecil dampak dari krisis ekonomi yang melanda Indonesia khususnya di bagian timur Indonesia.

2.2.3. Perkembangan Jumlah Rumah Tangga Perikanan Laut

Potensi lestari sumberdaya perikanan laut di Indonesia sangat potensial untuk dikembangkan. Dengan jumlah rumah tangga usaha nelayan laut sebesar

660.000 rumah tangga pada tahun 1993, dengan jumlah nelayan 1.889.524 orang terdiri dari 937.261 nelayan *full time* dan 952.263 nelayan *part time*.

Profil nelayan tradisional walaupun pada umumnya cukup terampil menggunakan peralatan yang dimilikinya dengan sarana penangkapan ikan dan kemampuan yang sangat terbatas dan seringkali sulit untuk ditingkatkan ke arah yang lebih modern. Posisi ekonomi nelayan yang sangat rendah diakibatkan karena modal terbatas, produktivitas yang rendah dengan hasil tangkapan ikan yang tidak menentu sebagai akibat pengaruh musim, juga dengan jaminan pemasaran ikan yang tidak menentu karena masih terdapatnya berbagai kendala dalam penentuan harga jual pada tingkat nelayan. Hal lain yang juga menarik adalah kondisi psikologis dan sosiologis masyarakat nelayan, umumnya berada dalam lingkungan hidup sosial yang cenderung tidak memikirkan hari depannya, dan karenanya kurang kesadaran untuk menyimpan sebagian pendapatan yang diperolehnya terutama pada saat musim ikan. Kondisi seperti di atas ternyata merupakan peluang bagi tumbuh suburnya para tengkulak, dengan memanfaatkan berbagai macam kelemahan yang dimiliki para nelayan tradisional. Tengkulak tersebut merupakan salah satu mata rantai usaha penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan, terutama dalam hal penyediaan sarana produksi dan permodalan yang diperlukan oleh nelayan. Pelayanan yang diberikan tengkulak kepada nelayan yang tidak berbelit-belit dan dapat dengan segera memberi layanan yang cepat, menjadikan nelayan semakin menyukai masuk pada lingkaran

tersebut, walaupun seringkali terdapat beberapa kerugian yang dialami oleh nelayan, terutama penentuan harga jual ikan hasil tangkapan nelayan yang hanya ditentukan secara sepihak oleh tengkulak sebagai pemberi modal. Untuk membangun kemampuan nelayan dalam hal penyediaan sarana dan permodalan dalam usaha penangkapan ikan, maka keterlibatan beberapa lembaga lembaga keuangan sangat diperlukan seperti koperasi dan bank-bank pemberi kredit pada saat yang tepat. Selain itu juga diperlukan adanya suatu lembaga yang dapat ikut serta di dalam peningkatan kualitas SDM nelayan, dengan berbagai macam program diantaranya. pelatihan peningkatan ketrampilan menangkap ikan. kemampuan berwirausaha yang baik dan benar serta beberapa kegiatan pemberdayaan masyarakat lainnya.⁸

2.2.4. Perkembangan Jumlah Perahu/Kapal

Armada penangkapan ikan di Indonesia yang beroperasi di ketiga wilayah perairan laut (perairan pantai, nusantara, dan ZEEI) menurut data tahun 1995, masing-masing: nelayan tradisional (perahu tanpa motor sebesar 229.337 dan perahu motor tempel sebesar 77.779 buah), nelayan semi tradisional (perahu motor sebanyak 45.049 buah), nelayan semi industri dan industri (kapal motor sebanyak 7.003 buah).

⁸Purwaka, T., *Pembangunan Sumberdaya Manusia dalam Kaitannya dengan Pelaksanaan Otonomi Pengelolaan Kelautan di Daerah*, Seminar Sehari, IPB, Bogor.

Ternyata armada penangkapan ikan yang beroperasi di perairan Indonesia, terutama pada perairan pantai masih didominasi (85%) oleh armada penangkapan yang relatif kecil atau tradisional. Di lain pihak armada yang berukuran lebih besar untuk operasi penangkapan di luar perairan pantai walaupun telah dilakukan penambahan dalam negeri tetap jumlahnya masih sangat kecil (15%). Karena investasi yang diperlukan termasuk relatif besar, menyebabkan perkembangannya sangat lambat, itupun didominasi oleh pengusaha asing kerjasama dengan pengusaha dalam negeri. Beberapa informasi dan data juga menyebutkan, bahwa jumlah armada yang beroperasi di perairan Indonesia oleh kapal-kapal asing tanpadiketahui (tanpa surat izin usaha penangkapan) semakin meningkat, akibat lemahnya pengawasan dan penegakan hukum di laut dalam kekuasaan yurisdiksi Indonesia. Untuk mengatasi hal tersebut maka diperlukan pengawas hukum laut dan diperlukan penegak hukum di laut yang secara menyeluruh. Dalam hal ini pemerintah telah mengupayakan kebijakan-kebijakan kebaharian yang mengatur tata tertib kelautan, sehingga mampu melindungi nelayan Indonesia dari serbuan nelayan asing. Kawasan Indonesia yang sebagian besar adalah laut, maka potensi ini perlu digali dan dieksplorasi semaksimal mungkin untuk kepentingan rakyat. Laut yang merupakan kehidupan nenek moyang bangsa Indonesia, maka perlu dilestarikan dan dibudidayakan sumber dayanya sehingga pemanfaatannya dapat dirasakan secara menyeluruh.

Secara sederhana hubungan antara beberapa komponen yang terkait dalam pengembangan usaha pembinaan dalam peningkatan kegiatan perikanan tangkap, maka minimal terdapat 5 komponen yang harus disinergikan secara bersama-sama untuk menghasilkan suatu proses percepatan pembangunan di bidang perikanan laut, khususnya perikanan tangkap, yaitu: unit pemasaran, unit sarana produksi, unit prasarana penangkapan ikan, unit usaha penangkapannya sendiri dan unit pengolahan. Pembinaan tersebut, dapat dilakukan secara terpadu yang difasilitasi oleh pemerintah melalui berbagai kebijakan yang menunjang baik untuk program-program jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang secara jelas dan konsisten.